

Relasi Partai Politik Islam Dengan Agama Dan Kekuasaan

Ahyar Nastainul Haq¹, Muh Dwi Angkasa Putra Amin², Kurniati³

UIN Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: ¹⁾ 10200124150@uin-alauddin.ac.id, ²⁾ 10200124143@uin-alauddin.ac.id, ³⁾ kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 11-03-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 01-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Relations, Parties, Politics, Islam, Power*

Islamic political parties play a crucial role in Indonesia's presidential system, channeling the political aspirations of Muslims and acting as actors in the dynamics of national power. However, the relationship between religion, Islamic political parties, and power often faces challenges due to political practices that tend to be pragmatic and oriented towards short-term interests. This study aims to analyze the position of Islamic political parties in Indonesia's presidential system and examine the relationship between religion and power in Islamic political practice. The study employed a qualitative method with a library research approach through analysis of various literature sources, scientific journals, and relevant references. The results indicate that Islamic political parties have not been fully able to substantively implement Islamic values in political practice due to the persistent influence of power interests and temporary political coalitions. Nevertheless, religion still plays a role as an ethical foundation that emphasizes the values of justice, trustworthiness, honesty, and the welfare of the people in the exercise of power. Therefore, strengthening the substantive implementation of Islamic values in political activities is necessary so that Islamic political parties can contribute optimally to realizing a democratic, just, and welfare-oriented system of government.

Abstrak

Partai politik Islam memiliki peran penting dalam sistem presidensial Indonesia sebagai sarana penyaluran aspirasi politik umat Islam sekaligus aktor dalam dinamika kekuasaan nasional. Namun, hubungan antara agama, partai politik Islam, dan kekuasaan sering menghadapi tantangan akibat praktik politik yang cenderung pragmatis dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi partai politik Islam dalam sistem presidensial Indonesia serta mengkaji hubungan agama dan kekuasaan dalam praktik politik Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui analisis berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik Islam belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara substantif dalam praktik politik karena masih kuatnya pengaruh kepentingan kekuasaan dan koalisi politik yang bersifat sementara. Meskipun demikian, agama tetap memiliki peran sebagai

Kata Kunci: Relasi, Partai, Politik, Islam, Kekuasaan landasan etis yang menekankan nilai keadilan, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan umat dalam penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi nilai-nilai Islam yang substantif dalam aktivitas politik agar partai politik Islam dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Partai politik Islam merupakan bagian penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya menjadi representasi aspirasi politik umat Islam sebagai kelompok mayoritas, tetapi juga berperan dalam memengaruhi arah kebijakan nasional. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, partai politik Islam mengalami berbagai perubahan dalam aspek ideologi, strategi perjuangan, dan pola dukungan masyarakat. Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik Islam memiliki posisi strategis karena berupaya menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan praktik politik modern. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai partai politik Islam menjadi penting untuk memahami hubungan antara agama dan demokrasi di Indonesia. Keberadaan partai politik Islam menunjukkan fenomena yang kontradiktif. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun partai-partai Islam belum mampu menjadi kekuatan dominan dalam pemilu nasional. Pada Pemilu 1999, partai-partai Islam hanya memperoleh sekitar 17,8% suara dan meningkat menjadi sekitar 21,17% pada Pemilu 2004, tetapi tetap berada di bawah dominasi partai nasionalis¹

Pada pemilu-pemilu berikutnya, perolehan suara partai Islam juga cenderung stagnan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara identitas religius masyarakat dengan preferensi politik mereka. Fenomena ini menjadi isu penting karena memperlihatkan bahwa faktor agama tidak selalu menjadi penentu utama dalam perilaku memilih masyarakat Indonesia. Dalam kajian akademik, terdapat berbagai pandangan mengenai posisi dan peran partai politik Islam dalam demokrasi. Sebagian akademisi menilai bahwa partai Islam tetap memiliki fungsi penting sebagai sarana penyaluran aspirasi umat dan penjaga nilai moral dalam kehidupan politik. Namun, terdapat pula pandangan yang lebih kritis yang menyatakan bahwa partai politik Islam belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. Permasalahan seperti konflik internal, lemahnya kaderisasi, serta kurangnya program politik yang inklusif sering dianggap sebagai penyebab rendahnya daya tarik partai Islam di mata pemilih². Selain itu, perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi juga masih berlangsung. Sebagian pihak menganggap demokrasi tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip Islam, sedangkan pihak lain memandang demokrasi sebagai bentuk ijtihad politik yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas partai politik Islam dari aspek historis, ideologis, dan elektoral. Penelitian mengenai perkembangan partai Islam pada masa awal kemerdekaan lebih banyak menekankan pentingnya ideologi Islam sebagai dasar perjuangan politik. Sementara itu, penelitian pada era reformasi lebih berfokus pada kekuatan elektoral partai Islam dan posisinya dalam struktur kekuasaan nasional. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum menghubungkan aspek ideologi partai dengan perubahan sosial-politik kontemporer, seperti perubahan perilaku pemilih, menguatnya politik

¹ Lili Romli, "Partai Islam Dan Pemilihan Islam Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 1, no. 1 (2004): 29–48.

² Yusuf Maulana, "Otonomi Daerah Dan Pembangunan Perdesaan," *Jurnal Penelitian Politik*. 13, no. 2 (2016): 261–68.

identitas, dan perkembangan demokrasi modern³. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan peran partai politik Islam dalam sistem demokrasi Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya dukungan masyarakat terhadap partai Islam. Penelitian ini juga bertujuan melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan aspek ideologi, strategi politik, dan perilaku pemilih dalam konteks politik kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan mengapa partai politik Islam belum mampu menjadi kekuatan dominan dalam politik nasional meskipun memiliki basis demografis yang besar. Argumentasi yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah bahwa rendahnya dukungan terhadap partai politik Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal partai, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan perubahan orientasi politik masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian politik Islam dan demokrasi serta menjadi bahan rekomendasi bagi penguatan partai politik Islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema yang dikaji. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh data dan informasi dari berbagai referensi ilmiah, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai partai politik Islam. Penggunaan penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian yang diteliti lebih banyak berkaitan dengan konsep, teori, pemikiran, serta pandangan normatif yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam dan ilmu politik.⁴ Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan analisis terhadap berbagai literatur yang dianggap relevan dan kredibel. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antar konsep, mengidentifikasi berbagai pandangan para ahli, serta mengungkap pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi dan peran partai politik Islam dalam perspektif syariah.⁵

Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan interpretasi yang mendalam terhadap berbagai pemikiran dan argumentasi yang ditemukan dalam sumber-sumber literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui analisis makna, konsep, nilai, dan interpretasi yang terkandung dalam berbagai sumber data. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam berbagai pemikiran, argumentasi, dan pandangan yang berkembang mengenai partai politik Islam tanpa terikat pada pengukuran statistik atau data kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga memadukan pendekatan normatif-teologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang bersumber

³ Lili Romli, "Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (2019): 78–98, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214>.

⁴ Miswar Miswar, "Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 14, no. 1 (2021): 13–21, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i1.32>.

⁵ Cecep Anwar and Ari Nuryana, "Nilai Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177 Dan Al-Nisa Ayat 36," *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 4, no. 2 (2019): 144–57, <https://doi.org/10.15575/ath.v4i2.4620>.

dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan berbagai literatur fikih yang berkaitan dengan aktivitas politik dalam Islam.⁶

Sementara itu, pendekatan teologis digunakan untuk memahami nilai-nilai keagamaan, prinsip-prinsip akidah, serta tujuan syariat yang menjadi landasan dalam menilai keberadaan dan peran partai politik Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah bagaimana ajaran syariah memandang partai politik Islam, baik dari aspek legitimasi, fungsi, tujuan, maupun kontribusinya dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dengan menggabungkan metode penelitian kepustakaan, pendekatan kualitatif, dan pendekatan normatif-teologis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, mendalam, dan sistematis mengenai partai politik Islam dalam perspektif syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian politik Islam kontemporer.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Relasi Partai Politik Islam

Relasi partai politik Islam merupakan hubungan yang terjalin antara partai politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan berbagai elemen kehidupan sosial, politik, keagamaan, dan kenegaraan. Dalam sistem politik modern, partai politik Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana perjuangan politik untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga menjadi wadah artikulasi aspirasi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran partai politik Islam menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam proses politik secara konstitusional dan demokratis. Secara historis, relasi partai politik Islam dengan masyarakat Muslim memiliki akar yang kuat. Partai politik Islam lahir dari kesadaran kolektif umat Islam untuk memperjuangkan kepentingan agama, sosial, ekonomi, dan politik melalui mekanisme yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, hubungan antara partai politik Islam dan masyarakat tidak hanya bersifat politik, tetapi juga kultural dan ideologis. Partai politik Islam sering kali memperoleh legitimasi dan dukungan dari kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan nilai, keyakinan, dan visi mengenai peran Islam dalam kehidupan publik.⁸

Dalam konteks demokrasi, relasi partai politik Islam dengan negara diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum, penyusunan kebijakan publik, pengawasan pemerintahan, serta keterlibatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Melalui mekanisme tersebut, partai politik Islam berupaya menyuarakan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan kesejahteraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, partai politik Islam juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan sistem politik yang pluralistik sehingga dapat menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat tanpa kehilangan identitas ideologisnya. Relasi partai politik Islam dengan organisasi keagamaan juga memiliki peranan penting. Dalam banyak kasus, partai politik Islam memiliki kedekatan historis maupun ideologis dengan organisasi-organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan kemasyarakatan. Hubungan ini dapat menjadi modal sosial yang memperkuat basis dukungan politik sekaligus memperluas pengaruh partai di tengah masyarakat.⁹

Akan tetapi, relasi tersebut perlu dikelola secara proporsional agar tidak menimbulkan politisasi agama yang berlebihan maupun konflik kepentingan antara tujuan dakwah dan

⁶ Sukatin, Indah Purnama Kharisma, and Galuh Safitri, "Efikasi Diri Dan Kestabilan Emosi Pada Prestasi Belajar," *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 28–39, <https://doi.org/10.24252/edu.v3i1.39695>.

⁷ Muhammad Rijal Fadli and Ajat Sudrajat, "Keislaman Dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy'Ari," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 109, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433>.

⁸ Khoiruddin Muchtar, "Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2016): 136, <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2127>.

⁹ Munawir Haris, "Potret Partisipasi Politik NU Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah," *Jurnal Review Politik*, 2012.

kepentingan politik praktis. Dari perspektif Islam, relasi partai politik Islam idealnya dibangun berdasarkan prinsip syura (musyawarah), keadilan (*al-'adl*), persaudaraan (*ukhūmah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab (*amanah*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan moral dalam menjalankan aktivitas politik sehingga kekuasaan tidak semata-mata dijadikan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan nilai-nilai kebaikan. Dalam kerangka ini, partai politik Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengedepankan etika politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada era kontemporer, relasi partai politik Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti globalisasi, perubahan perilaku pemilih, meningkatnya pragmatisme politik, serta tuntutan demokrasi yang semakin kompleks.¹⁰

Tantangan tersebut menuntut partai politik Islam untuk melakukan transformasi dan inovasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitasnya. Keberhasilan partai politik Islam dalam membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat, negara, dan berbagai kelompok sosial akan sangat menentukan kontribusinya dalam mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, relasi partai politik Islam tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik, tetapi juga menyangkut upaya membangun sinergi antara nilai-nilai Islam dan praktik demokrasi. Relasi tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi politik umat, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai moral keagamaan.¹¹

B. Agama dan Kekuasaan

Agama dan kekuasaan merupakan dua entitas yang memiliki hubungan erat dalam perjalanan sejarah peradaban manusia. Agama berfungsi sebagai sumber nilai, norma, dan pedoman moral yang mengatur kehidupan individu maupun masyarakat, sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan atau kewenangan untuk mengatur, memengaruhi, dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam suatu sistem sosial dan politik. Dalam banyak peradaban, agama dan kekuasaan sering kali saling berinteraksi, baik dalam bentuk kerja sama, legitimasi, maupun hubungan yang bersifat kritis dan korektif. Oleh karena itu, kajian mengenai relasi agama dan kekuasaan menjadi salah satu tema penting dalam studi politik, sosiologi, maupun pemikiran Islam. Dalam perspektif historis, agama sering menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan politik. Para pemimpin dan penguasa memanfaatkan nilai-nilai agama untuk memperoleh dukungan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, institusi agama juga kerap memanfaatkan kekuasaan politik untuk mendukung penyebaran ajaran agama, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi kepentingan umat. Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk struktur sosial dan politik suatu masyarakat.¹²

Dalam tradisi Islam, hubungan antara agama dan kekuasaan memiliki posisi yang sangat penting. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman mengenai kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Sejak masa Nabi Muhammad di Madinah, agama dan kekuasaan berjalan secara terpadu dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai

¹⁰ Rifky Alisandy et al., "Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif Pendahuluan Kekuasaan Dalam Suatu Negara Mengacu Pada Kewenangan Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Dalam Lingkup Tindakannya . Menurut Miriam Budiardjo , Kekuasaan Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Mempengaruhi," 1945, 1–16.

¹¹ Lili Romli, "Partai Islam Dan Pemilihan Islam Di Indonesia."

¹² Sopwan Mulyawan, "Studi Ilmu Ma'Ani (Stylistic) Terhadap Ayat-Ayat Surat Yasin," *Holistik* 12, no. 2 (2011): 97–113.

keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin politik yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip wahyu. Model kepemimpinan ini kemudian menjadi salah satu rujukan dalam pemikiran politik Islam mengenai hubungan agama dan negara. Dalam pandangan Islam, kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, agama berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan penggunaan kekuasaan agar tidak terjebak pada praktik-praktik tirani, korupsi, penindasan, maupun penyalahgunaan wewenang.¹³

Di sisi lain, agama juga memiliki fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Nilai-nilai keagamaan menjadi instrumen etis yang dapat mengkritik kebijakan atau tindakan penguasa yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berperan sebagai pemberi legitimasi, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang mengawasi jalannya pemerintahan. Peran tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat luas. Pada era modern, hubungan agama dan kekuasaan menghadapi berbagai dinamika akibat berkembangnya demokrasi, pluralisme, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin kompleks. Sebagian negara memisahkan agama dari urusan negara, sementara sebagian lainnya tetap memberikan ruang yang besar bagi agama dalam kehidupan politik. Dalam masyarakat yang plural, hubungan agama dan kekuasaan perlu dikelola secara bijaksana agar dapat menciptakan harmoni sosial, menghormati keberagaman, serta mencegah konflik yang berpotensi muncul akibat perbedaan keyakinan dan kepentingan politik.¹⁴

Bagi masyarakat Muslim, relasi agama dan kekuasaan idealnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan (*al-'adl*), amanah, persamaan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang berintegritas, responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, agama dan kekuasaan tidak dipahami sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua unsur yang dapat bersinergi untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, bermoral, dan berkeadaban. Dengan demikian, hubungan agama dan kekuasaan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Agama memberikan dasar etika dan moral bagi pelaksanaan kekuasaan, sedangkan kekuasaan menyediakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Ketika keduanya berjalan secara seimbang dan proporsional, maka akan tercipta tata kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁵

C. Relasi Partai Politik Islam Dengan Agama Dan Kekuasaan

Politik Islam sebagaimana, memiliki peran sebagai sarana untuk menjadikan ajaran Islam yang mencakup aqidah dan syariat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral atau spiritual semata,

¹³ Marwan Gultom, "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam," *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2021): 79, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>.

¹⁴ Nilhakim Nilhakim, "Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer," *AL-SULTHANIYAH*, 2021, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.379>.

¹⁵ Gultom, "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam."

tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan aktivitas politik agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Politik dalam Islam merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, sehingga kekuasaan harus dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab¹⁶. Oleh karena itu, politik Islam berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara benar, tidak disalahgunakan, serta senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, politik Islam memiliki dimensi etis yang kuat, di mana kekuasaan tidak bersifat bebas nilai, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip moral Islam.

Dengan memahami secara menyeluruh tentang politik Islam dan kekuasaan, dibutuhkan analisis yang radikal dan sistematis terhadap persoalan-persoalan ini, termasuk penerapan kritik yang konstruktif terhadap struktur politik yang ada. Pengkajian politik Islam perlu diperdalam di berbagai lembaga pendidikan Islam untuk menghasilkan pendekatan baru yang lebih inklusif dan etis dalam memahami kekuasaan serta tatanan politik secara luas¹⁷. Pemahaman yang komprehensif tentang politik Islam dan kekuasaan perlu didukung oleh kajian yang kritis dan sistematis agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara etis dalam kehidupan politik. Penguatan studi politik Islam di lembaga pendidikan penting untuk menghasilkan pemikiran yang lebih inklusif, relevan, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat dalam menghadapi dinamika politik modern.

Hal ini akan membantu menghadapi tantangan modernitas dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer, sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek legal-formal dan nilai-nilai keIslaman yang lebih dalam dan relevan. Kekuasaan, dalam berbagai wujudnya, menjadi fokus perhatian utama dalam konteks politik Islam. Sebagai dimensi sentral dalam tata kelola suatu negara dan masyarakat, pemahaman terhadap kekuasaan dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup aspek kelembagaan dan administratif, tetapi juga menggali akar filosofis dan etis yang mengatur penggunaan kekuasaan¹⁸. politik Islam dan kekuasaan menuntut pendekatan yang kritis, terstruktur, dan menyeluruh. Politik Islam tidak hanya dipahami dari sisi institusi dan administrasi, tetapi juga perlu dianalisis dari dimensi filosofis serta etika dalam penggunaan kekuasaan. Karena itu, studi politik Islam di lingkungan pendidikan Islam menjadi penting untuk melahirkan pemikiran yang lebih terbuka, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek hukum-formal dan nilai-nilai etis Islam menjadi hal utama dalam memahami kekuasaan dalam perspektif politik Islam.

Hubungan antara agama dan kekuasaan dalam politik Islam menunjukkan keterkaitan yang sangat erat, di mana agama berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai alat untuk mengatur negara, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Agama memberikan dasar etika politik yang menjadi acuan bagi setiap kebijakan dan tindakan penguasa agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat¹⁹. Dengan demikian, hubungan antara agama dan kekuasaan dalam Islam bersifat saling menguatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Politik Islam sangat erat, di mana agama menjadi dasar legitimasi dan

¹⁶ MUH. IN'AMUZZAHIDIN, "Etika Politik Dalam Islam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 89, <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>.

¹⁷ Rofik Aksan, "Kekuasaan Dan Politik Lembaga Pendidikan Islam," *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 10, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i1.6898>.

¹⁸ S Salamah and E Efendi, "Kekuasaan Dalam Politik Islam: Analisis Terhadap Dimensi Kedudukan Hukum Dan Kepribadian," *Innovative: Journal Of Social Science ...* 4 (2024): 5973–82.

¹⁹ Jun Mawalidin Jun, "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 66–85, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3904>.

pedoman etika dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai Islam untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan maslahat bagi umat.

Dalam praktiknya, keterkaitan antara agama dan kekuasaan tersebut menuntut adanya implementasi nilai-nilai Islam secara nyata dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam upaya penegakan keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta pengelolaan kekuasaan yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, peran pemimpin dalam politik Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, karena setiap kebijakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, integrasi antara nilai agama dan kekuasaan menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, adil, dan berpihak pada kemaslahatan umat²⁰. Keterkaitan antara agama dan kekuasaan dalam politik Islam menuntut penerapan nilai-nilai Islam secara konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kebijakan publik.

Hal ini terlihat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, serta mengelola kekuasaan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, pemimpin dalam politik Islam tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga tanggung jawab moral, karena setiap keputusan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, perpaduan antara nilai agama dan kekuasaan menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kekuasaan juga dipandang sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan agama dalam kehidupan bernegara, seperti terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan ketertiban yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif ini, agama dan negara cenderung tidak dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, hubungan ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam masyarakat yang majemuk, karena perbedaan pemahaman agama atau kepentingan politik dapat memicu konflik maupun penyalahgunaan agama untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan agar nilai-nilai agama tetap menjadi pedoman tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberagaman dalam kehidupan bernegara.

Partai politik adalah pengelompokan dari suatu golongan dalam bentuk organisasi umum, yang dapat dibedakan berdasarkan wilayah aktivitasnya, seperti organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan organisasi publik. Dalam ini Sistem presidensial pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, dengan kata lain kekuatan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuatan yang kuat, karena selain menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang memimpin pemerintahan yang mengetuai kabinet (Menter-Menteri).

Politik Islam adalah pengaturan urusan negara Islam yang tidak terdapat nash yang jelas mengenai hukumnya atau yang kondisinya berubah-ubah (dinamis) serta mengandung kemaslahatan bagi umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam perspektif politik Islam, terdapat pandangan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Umat Islam meyakini bahwa Islam merupakan ajaran yang menyeluruh sehingga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam

²⁰ Sya'ba H.muhammad, "Refleksi" X, no. 2 (2009).

penyelenggaraan negara dan penggunaan kekuasaan²¹. Oleh karena itu, partai politik Islam menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam aktivitas politik dan perjuangannya.²² Partai politik adalah organisasi yang menghimpun kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang untuk tujuan politik. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang kuat karena berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Politik Islam sendiri mengatur urusan negara berdasarkan prinsip kemaslahatan umat dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat, terutama pada hal-hal yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas.

Dalam praktiknya di Indonesia, partai politik sering membentuk koalisi yang bersifat sementara dan didasarkan pada kepentingan masing-masing, sehingga kerja sama antarpolitical dapat berubah sesuai situasi politik. Nurcholish Madjid menekankan bahwa politik Islam seharusnya lebih mengutamakan nilai keadilan, kemaslahatan, dan demokrasi daripada simbol formal partai Islam²³. Beberapa partai Islam cenderung lebih mengutamakan persaingan kekuasaan serta kepentingan politik sesaat daripada mengembangkan nilai-nilai Islam secara substansial. Hal tersebut terlihat dari pola koalisi antarpolitical yang sering berubah mengikuti kebutuhan dan kepentingan politik tertentu, sehingga identitas keislaman yang dimiliki partai kadang hanya digunakan sebagai sarana untuk menarik dukungan masyarakat. Dampaknya, tujuan politik Islam yang semestinya menitikberatkan pada kemaslahatan umat, keadilan, dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercermin dalam praktik politik. Oleh karena itu, partai politik Islam tidak seharusnya hanya menampilkan simbol atau identitas keislaman, tetapi juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai etika, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial dalam setiap kebijakan dan kegiatan politik agar cita-cita politik Islam dapat diwujudkan secara nyata dan tidak berhenti pada aspek formalitas semata.

Pandangan Nurcholish Madjid tersebut sejalan dengan perkembangan politik hukum Islam di Indonesia yang menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam tidak cukup hanya diwujudkan melalui simbol, identitas partai, atau formalisasi hukum semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan.²⁴ Dengan demikian, keberhasilan politik Islam tidak diukur dari banyaknya simbol keislaman yang ditampilkan, melainkan dari sejauh mana substansi ajaran Islam mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kehidupan bernegara.

Agama sering kali tidak hanya dipahami sebagai pedoman moral, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dukungan politik dan mempertahankan kekuasaan, sehingga nilai-nilai substantif agama dalam politik kerap mengalami pergeseran makna. Hal ini sejalan dengan pendapat Erman Adia Kusumah yang menyatakan bahwa “agama menjadi media untuk mendapatkan kekuasaan sehingga dimanfaatkan sebagai alat untuk mempengaruhi dan menguasai masyarakat”²⁵. Ketika agama dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan politik, terdapat kemungkinan terjadinya penyempitan makna sehingga nilai-nilai inti agama seperti keadilan, etika, dan kemaslahatan umat tidak lagi menjadi fokus utama. Meski demikian, keterlibatan agama dalam

²¹ kurniati, ernawati, syamsir bahar et al., “Penerapan Etika Politik Rasulullah Dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini Etika Politik Islam Dapat Dilihat Dalam Beberapa Aspek Seperti : Pengangkatan Mempengaruhi Perilaku Orang , Prinsip Moral Yang Dipengaruhi Oleh Perilaku Individu . Di Sisi Sta,” no. 5 (2024): 264–75.

²² M MUFLEH, “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam,” 2022, 33.

²³ Jun, “Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia.”

²⁴ 2023 POLITICAL CONFIGURATION OF ISLAMIC LAW IN LEGAL DEVELOPMENT IN INDONESIA Kurniati, et al., “No,” n.d.

²⁵ Erman Adia Kusumah et al., “Wahabi : Politik Agama Dan Hasrat Kekuasaan Di Indonesia Secara Kelembagaan Islam Disebarkan Oleh 2010 , Islam Ada Diurutan Kedua Dengan Jumlah Negara Dengan Komunitas Muslim Terbanyak,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. September 2016 (2020): 58–63.

ruang publik tidak dapat sepenuhnya dihindari karena nilai-nilainya juga dapat menjadi landasan etis dalam berpolitik. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah memastikan bahwa agama digunakan secara proporsional agar tetap berperan sebagai pedoman moral dalam kehidupan politik, bukan sekadar sebagai sarana untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Hubungan partai politik Islam dengan agama dan kekuasaan memiliki pengaruh yang besar terhadap praktik politik dalam suatu negara. Di satu sisi, nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman moral dalam menjalankan kekuasaan sehingga mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang adil, amanah, dan berpihak pada masyarakat. Akan tetapi, apabila agama hanya dijadikan alat politik atau simbol kekuasaan, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, polarisasi, serta penyalahgunaan agama demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara agama, partai politik Islam, dan kekuasaan harus tetap berlandaskan pada nilai etika, demokrasi, dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekuasaan dalam suatu negara mengacu pada kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam lingkup tindakannya. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya orang tersebut mau mengikuti apa yang ia kehendaki²⁶. Esensi kekuasaan terletak pada hubungan pengaruh antara individu atau kelompok, sehingga dalam praktiknya sangat berkaitan dengan proses politik dan pengambilan kebijakan.

Akan tetapi, kekuasaan seperti ini harus tetap dibatasi oleh hukum serta prinsip-prinsip demokrasi agar tidak disalahgunakan. Tanpa adanya pengawasan dan mekanisme kontrol yang memadai, kekuasaan dapat berubah menjadi sarana dominasi yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Munawir melihat bahwa Islam menggariskan seperangkat prinsip etis yang relevan dalam proses penyelenggaraan negara. Antara lain: nilai-nilai musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan persamaan (musawa). Inilah yang harus ditegakkan oleh komunitas politik Islam bukan hal-hal yang bersifat ideologi formal²⁷. Pandangan Munawir menegaskan bahwa ajaran Islam lebih menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bernegara dibandingkan pada pembentukan negara yang bersifat formalistik keagamaan. Nilai musyawarah, keadilan, dan persamaan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas suatu negara tidak hanya dilihat dari simbol-simbol keislamannya, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, hubungan antara Islam dan negara pada dasarnya tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara agama secara formal, melainkan melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, amanah, dan persamaan akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, substansi ajaran Islam dalam bernegara lebih menekankan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil dan bermoral daripada sekadar penggunaan identitas atau simbol-simbol keagamaan dalam struktur negara. Dalam konteks tersebut, perjuangan politik Islam lebih diarahkan pada penerapan nilai-nilai etis dan moral dalam kehidupan bernegara daripada

²⁶ Alisandy et al., "Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif Pendahuluan Kekuasaan Dalam Suatu Negara Mengacu Pada Kewenangan Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Dalam Lingkup Tindakannya . Menurut Miriam Budiardjo , Kekuasaan Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Mempengaruhi."

²⁷ muhammadh fauzan Naufal, *Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Baktiar Effendy) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H / 2017 M Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia 1439 H / 2017 M*, 2017.

menekankan pembentukan simbol atau lembaga formal keagamaan²⁸. Dengan demikian, substansi ajaran Islam dapat diwujudkan melalui praktik politik yang menjunjung keadilan, musyawarah, persamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat politik Islam bukan terfokus pada simbol maupun identitas formal keagamaan, tetapi lebih pada implementasi nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sistem politik yang menjunjung keadilan, musyawarah, persamaan, serta kesejahteraan masyarakat dinilai lebih sesuai dengan tujuan utama ajaran Islam.

Dengan demikian, keberhasilan politik Islam tidak hanya diukur dari bentuk atau label keislaman suatu negara, melainkan dari kemampuan pemerintahan dalam menjalankan amanah, menciptakan keadilan, dan memenuhi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Bahwa hakikat politik Islam lebih berorientasi pada penerapan nilai-nilai etika, moral, dan kemanusiaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan hanya menonjolkan simbol-simbol keagamaan secara formal. Kekuasaan yang dijalankan dengan berlandaskan keadilan, musyawarah, amanah, persamaan, serta kesejahteraan masyarakat mencerminkan tujuan utama ajaran Islam dalam kehidupan bernegara (Basyir, 2016b). Oleh karena itu, keberhasilan suatu pemerintahan tidak semata-mata diukur dari identitas keagamaannya, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan. Dalam perspektif ini, hukum dan kekuasaan tidak hadir untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk melayani kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat²⁹. Hubungan partai politik Islam dengan agama dan kekuasaan memberikan dampak terhadap arah praktik politik dalam suatu negara. Di satu sisi, nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman moral dalam menjalankan kekuasaan sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang adil, amanah, dan berpihak pada masyarakat. Namun, di sisi lain, apabila agama hanya dijadikan alat politik atau simbol kekuasaan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, polarisasi, serta penyalahgunaan agama demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara agama, partai politik Islam, dan kekuasaan harus tetap berlandaskan pada nilai etika, demokrasi, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Kesimpulan

Hubungan partai politik Islam dengan agama dan kekuasaan memiliki pengaruh yang besar terhadap praktik politik dalam suatu negara. Di satu sisi, nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman moral dalam menjalankan kekuasaan sehingga mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang adil, amanah, dan berpihak pada masyarakat. Akan tetapi, apabila agama hanya dijadikan alat politik atau simbol kekuasaan, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, polarisasi, serta penyalahgunaan agama demi kepentingan politik tertentu. Hubungan antara agama, partai politik Islam, dan kekuasaan harus tetap berlandaskan pada nilai etika, demokrasi, dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, partai politik Islam belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara substantif dalam praktik politik karena kuatnya pengaruh kepentingan kekuasaan serta koalisi politik yang bersifat sementara. Akan tetapi, agama tetap memiliki peran sebagai landasan etis yang menekankan nilai keadilan, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan umat dalam penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi nilai-nilai Islam yang substantif dalam aktivitas politik agar partai politik Islam dapat

²⁸ Kunawi Basyir, "Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 339, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.423>.

²⁹ Ajud Ishak Kurniati, Hendrik imran, "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia : Sebuah Telaah Konseptual," *Al-Himayah* 05, no. 01 (2021): 1–14.

berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aksan, Rofik. "Kekuasaan Dan Politik Lembaga Pendidikan Islam." *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 10, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i1.6898>.
- Alisandy, Rifky, Ahmad Algibran, Bayu Rasya Habibie, and Nurlaili Rahmawati. "Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif Pendahuluan Kekuasaan Dalam Suatu Negara Mengacu Pada Kewenangan Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Dalam Lingkup Tindakannya . Menurut Miriam Budiardjo , Kekuasaan Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Mempengaruhi," 1945, 1–16.
- Anwar, Cecep, and Ari Nuryana. "Nilai Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177 Dan Al-Nisa Ayat 36." *Attbulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 4, no. 2 (2019): 144–57. <https://doi.org/10.15575/ath.v4i2.4620>.
- Basyir, Kunawi. "Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 339. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.423>.
- Fadli, Muhammad Rijal, and Ajat Sudrajat. "Keislaman Dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy'Ari." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 109. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433>.
- Gultom, Marwan. "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam." *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2021): 79. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>.
- H.muhammad, Sya'ba. "Refleksi" X, no. 2 (2009).
- Haris, Munawir. "Potret Partisipasi Politik NU Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah." *Jurnal Review Politik*, 2012.
- IN'AMUZZAHIDIN, MUH. "Etika Politik Dalam Islam." *Wabana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 89. <https://doi.org/10.21580/wa.v2i2.382>.
- Jun, Jun Mawalidin. "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 66–85. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3904>.
- kurniati, ernawati, syamsir bahar, Program Studi, Hukum Tata, Fakultas Syari, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Penerapan Etika Politik Rasulullah Dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini Etika Politik Islam Dapat Dilihat Dalam Beberapa Aspek Seperti : Pengangkatan Mempengaruhi Perilaku Orang , Prinsip Moral Yang Dipengaruhi Oleh Perilaku Individu . Di Sisi Sta," no. 5 (2024): 264–75.
- Kurniati, et al., 2023 POLITICAL CONFIGURATION OF ISLAMIC LAW IN LEGAL DEVELOPMENT IN INDONESIA. "No," n.d.
- Kurniati, Hendrik imran, Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia : Sebuah Telaah Konseptual." *Al-Himayah* 05, no. 01 (2021): 1–14.
- Kusumah, Erman Adia, Nabi Muhammad, As-saud Muhammad, and Ibn Abdul. "Wahabi : Politik Agama Dan Hasrat Kekuasaan Di Indonesia Secara Kelembagaan Islam Disebarkan Oleh 2010 , Islam Ada Diurutan Kedua Dengan Jumlah Negara Dengan Komunitas Muslim Terbanyak." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. September 2016 (2020): 58–63.
- Lili Romli. "Partai Islam Dan Pemilihan Islam Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 1, no. 1 (2004): 29–48.
- Maulana, Yusuf. "Otonomi Daerah Dan Pembangunan Perdesaan." *Jurnal Penelitian Politik*. 13, no. 2 (2016): 261–68.
- Miswar, Miswar. "Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 14, no. 1 (2021): 13–21. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i1.32>.
- Muchtar, Khoiruddin. "Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2016): 136. <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2127>.

- MUFLEH, M. “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam,” 2022, 33.
- Mulyawan, Sopwan. “Studi Ilmu Ma’Ani (Stylistic) Terhadap Ayat-Ayat Surat Yasin.” *Holistik* 12, no. 2 (2011): 97–113.
- Naufal, muhammad fauzan. *Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Baktiar Effendy) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H / 2017 M Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia 1439 H / 2017 M*, 2017.
- Nilhakim, Nilhakim. “Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer.” *AL-SULTHANIYAH*, 2021.
<https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.379>.
- Romli, Lili. “Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (2019): 78–98.
<https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214>.
- Salamah, S, and E Efendi. “Kekuasaan Dalam Politik Islam: Analisis Terhadap Dimensi Kedudukan Hukum Dan Kepribadian.” *Innovative: Journal Of Social Science ...* 4 (2024): 5973–82.
- Sukatin, Indah Purnama Kharisma, and Galuh Safitri. “Efikasi Diri Dan Kestabilan Emosi Pada Prestasi Belajar.” *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 28–39.
<https://doi.org/10.24252/edu.v3i1.39695>.